EKSPEKTASI
Jurnal pendidikan Ekonomi
ISSN 2722-3353 (Online)

Pengaruh Pengangguran dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Selatan

Fadlan Fadillah*[1], Dedi Prayogi[2], Arif Saputra[3], Lingko Primajaya[4], Maya Panorama[5]
Fadlanbabat0@gmail.com*[1], prayogid999@gmail.com[2], saputraarif06690@gmail.com[3]
koprimajy@gmail.com[4], mayapanorama_uin@radenfatah.ac.id[5]

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat pengangguran dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2011–2025. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linear berganda yang diolah menggunakan perangkat lunak IBM SPSS Statistics. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangguran dan inflasi berpengaruh positif serta signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Berdasarkan uji parsial (uji t), pengangguran memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001 dan inflasi sebesar 0,024, sehingga keduanya terbukti berpengaruh nyata terhadap kemiskinan. Hasil uji simultan (uji F) juga menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang menandakan adanya pengaruh bersama kedua variabel terhadap kemiskinan. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,472 menunjukkan bahwa 47,2% variasi kemiskinan dapat dijelaskan oleh pengangguran dan inflasi, sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model penelitian. Dengan demikian, pengangguran menjadi variabel dominan yang memengaruhi kemiskinan.

Kata kunci: inflasi, kemiskinan, regresi linear berganda, pengangguran

ABSTRACT: *This study aims to analyze the influence of unemployment and inflation on poverty levels in South Sumatra Province during the period 2011–2025. The study used a quantitative approach with multiple linear regression methods processed using IBM SPSS Statistics software. The data used were secondary data sourced from the Central Statistics Agency (BPS) and Bank Indonesia. The results show that unemployment and inflation have a positive and significant effect on poverty levels.Based on the partial test (t-test), unemployment has a significance value of 0.001 and inflation of 0.024, thus both are proven to have a significant effect on poverty. The results of the simultaneous test (F-test) also showed a significance value of 0.000, indicating a joint influence of both variables on poverty. The coefficient of determination (R^2) value of 0.472 indicates that 47.2% of the variation in poverty can be explained by unemployment and inflation, while the remainder is influenced by other factors outside the research model. Thus, unemployment is the dominant variable influencing poverty.*

Keywords: *inflation, multiple linear regression, poverty, unemployment*

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah salah satu isu nasional yang sangat fundamental dan menggambarkan kualitas dan kemakmuran suatu negara, masalah ini tidak hanya muncul di kawasan tertentu, tetapi merupakan tantangan yang dihadapi hampir oleh semua negara, terutama negara-negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia, dan lainnya. Ini terjadi karena kemiskinan memiliki sifat yang beragam dalam banyak dimensi. Dengan kata lain, karena keanekaragaman kebutuhan manusia, kemiskinan mencakup berbagai aspek. Secara umum, kemiskinan mencakup elemen dasar seperti kekurangan aset dan rendahnya kemampuan, serta elemen tambahan seperti kurangnya akses ke Jaringan relasi sosial, ketersediaan dana, akses terhadap informasi, serta berbagai sumber daya tambahan lainnya (Imanto dkk., 2020). Salah satu faktor utama yang memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kemiskinan yaitu pengangguran. Secara teoritis, semakin tinggi tingkat pengangguran, semakin besar pula potensi meningkatnya jumlah penduduk yang berada dalam kondisi kemiskinan. Hal ini searah dengan teori makroekonomi bahwa jika peluang kerja menipis maka pendapatan masyarakat juga akan berkurang dan menyebabkan kemiskinan.

Setelah pengangguran ada juga inflasi yang merupakan salah satu variabel ekonomi yang berpotensi meningkatkan tingkat kemiskinan. Peningkatan inflasi menyebabkan harga barang dan jasa cenderung naik, sehingga daya beli masyarakat mengalami penurunan dan kemampuan memenuhi kebutuhan hidup menjadi terbatas, terutama dikalangan masyarakat prasejahtera, situasi ini dapat memperburuk kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan jumlah penduduk yang masuk golongan atau kategori miskin. Inflasi yang terjadi secara terus-menerus dalam periode yang panjang tanpa upaya pengendalian yang efektif dapat berdampak negatif terhadap stabilitas ekonomi dan berpotensi meningkatkan ketimpangan sosial di masyarakat.

Berbagai langkah telah dilakukan pemerintah dalam upaya menekan tingkat kemiskinan, termasuk melalui pengendalian inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan yang ditandai dengan meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode tertentu. Kenaikan harga yang hanya terjadi pada satu jenis barang tidak dapat disebut sebagai inflasi, kecuali apabila kenaikan tersebut memengaruhi dan menyebabkan harga barang serta jasa lainnya turut meningkat secara luas. Dengan bertambahnya inflasi, kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup biasanya akan menurun. Keadaan ini pada akhirnya dapat meningkatkan angka kemiskinan. Tingginya angka kemiskinan di suatu wilayah juga berhubungan dengan rendahnya daya beli masyarakat, yang kebanyakan disebabkan oleh penghasilan yang masih terbatas(Mardiatillah dkk., 2021).

Keadaan tersebut berpotensi semakin memburuk ketika tingkat pengangguran berada pada level yang tinggi. Pengangguran saat ini tidak hanya menjadi permasalahan dalam bidang ekonomi, melainkan juga berkembang menjadi isu sosial dan politik. Tingginya angka pengangguran dapat memunculkan berbagai konsekuensi sosial, seperti meningkatnya tindak kejahatan, termasuk pencurian, perampokan, dan aktivitas ilegal lainnya. Fenomena ini sering kali berkaitan dengan tekanan ekonomi yang dihadapi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar kehidupan.

Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu daerah dengan aktivitas ekonomi yang terus berkembang. Namun demikian, berbagai permasalahan ekonomi, seperti pengangguran, inflasi, dan kemiskinan, masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian. Tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan masih relatif tinggi, yang tercermin dari persentase penduduk miskin yang berada di atas rata-rata nasional (Primandari, 2018). Data statistik menunjukkan bahwa fluktuasi tingkat pengangguran dan inflasi sering kali diikuti oleh perubahan tingkat kemiskinan. Namun, hubungan antar variabel tersebut tidak selalu

bersifat linier, sehingga perlu dilakukan analisis empiris untuk mengetahui pengaruhnya secara lebih mendalam.

Sejumlah penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan dalam jurnal terakreditasi menunjukkan bahwa pengangguran dan inflasi merupakan faktor yang berkaitan dengan tingkat kemiskinan. Penelitian yang dilakukan oleh Mardiatillah dkk. (2021) di Provinsi Sumatera Selatan menemukan bahwa pengangguran dan inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hasil uji simultan menunjukkan nilai signifikansi F sebesar 0,044 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga kedua variabel tersebut dinyatakan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Subraba (2018) di Daerah Istimewa Yogyakarta memperoleh hasil yang berbeda. Berdasarkan estimasi model *fixed effect*, variabel inflasi memiliki nilai probabilitas sebesar 0,2896, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 5% (0,05), dengan koefisien sebesar 456,9146. Hasil tersebut menunjukkan bahwa inflasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan kedua penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa pengaruh pengangguran dan inflasi terhadap kemiskinan tidak selalu menunjukkan hasil yang sama. Perbedaan tingkat signifikansi dapat dipengaruhi oleh karakteristik wilayah, kondisi ekonomi daerah, serta periode penelitian yang digunakan.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai hubungan antara pengangguran, inflasi, dan tingkat kemiskinan. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh pengangguran dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ekonomi Pembangunan, serta memberikan masukan yang bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang tepat guna menekan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

LANDASAN TEORI

Kemiskinan

Kemiskinan dapat dipahami sebagai keadaan ketika individu atau rumah tangga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Selain dipengaruhi oleh tingkat pendapatan yang rendah, kemiskinan juga terkait dengan terbatasnya akses terhadap sarana, layanan, dan kesempatan yang diperlukan untuk mencapai kehidupan yang layak.

Secara umum, kemiskinan dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yakni kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut menggambarkan kondisi ketika pendapatan yang dimiliki tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Sementara itu, kemiskinan relatif merujuk pada keadaan di mana seseorang telah mampu memenuhi kebutuhan dasar dan berada di atas garis kemiskinan, namun masih mengalami ketertinggalan tingkat kesejahteraan dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya(Papilaya, 2020). Pada hakikatnya, seluruh bentuk kemiskinan mencerminkan ketidakmampuan individu atau kelompok masyarakat untuk mencapai standar hidup yang layak, yang ditandai oleh keterbatasan ekonomi, rendahnya akses sosial, serta terbatasnya pemanfaatan sumber daya dasar yang tersedia. indikator-indikator kemiskinan sebagaimana dikutip dari Badan Pusat Statistik (BPS) meliputi beberapa hal berikut:

1. Ketidakmampuan individu maupun rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.
2. Tidak tersedianya akses yang memadai terhadap berbagai kebutuhan dasar kehidupan, antara lain layanan kesehatan,

pendidikan, sanitasi, air bersih, dan sarana transportasi.

3. Tidak adanya kepastian untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera di masa depan akibat minimnya investasi dalam bidang pendidikan dan pengembangan keluarga.

4. Besarnya kemungkinan individu atau masyarakat mengalami dampak dari berbagai guncangan, baik yang bersifat pribadi maupun kolektif.

5. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia yang berdampak pada rendahnya kemampuan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal, serta berkurangnya peran aktif dalam berbagai kegiatan sosial di masyarakat.

6. Keterbatasan kesempatan dalam memperoleh pekerjaan serta sumber penghidupan yang dapat menjamin keberlangsungan ekonomi.

7. Adanya kendala fisik dan mental yang mengurangi kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas ekonomi secara efektif dan produktif.

8. Ketidakmampuan untuk menjalani kehidupan secara mandiri yang disertai ketergantungan terhadap pihak lain dapat dialami oleh berbagai kelompok rentan, seperti anak terlantar, perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, janda miskin, dan masyarakat yang terisolasi.

Tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi terus menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan pembangunan, khususnya di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Menurut Hildegunda (2010), kemiskinan menggambarkan kondisi ketika individu atau rumah tangga mengalami keterbatasan sumber daya ekonomi sehingga tidak mampu mencapai standar kesejahteraan yang umum berlaku di lingkungan tempat mereka tinggal. Dengan demikian, kemiskinan dapat diartikan sebagai permasalahan sosial yang memiliki cakupan luas dan melibatkan berbagai aspek kehidupan, yang ditandai oleh ketidakmampuan individu maupun kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar secara layak.

Pengangguran

Pengangguran siklikal terkait dengan perubahan aktivitas ekonomi, di mana saat ekonomi melambat, kebutuhan akan tenaga kerja juga akan berkurang. Di sisi lain, pengangguran friksional umumnya bersifat sementara dan tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap ekonomi. Sebaliknya, pengangguran struktural cenderung berlangsung lebih lama dan dapat menyebabkan konsekuensi yang lebih parah. Oleh karena itu, pengangguran struktural harus diselesaikan dengan kebijakan yang tepat, seperti pelatihan ulang dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (Damanik dkk., 2026).

Pengangguran siklikal adalah tipe pengangguran yang muncul akibat fluktuasi dalam siklus ekonomi (Mankiw, 2018). Ketika ekonomi mengalami kemerosotan atau kondisi resesi sering mendorong perusahaan untuk mengurangi jumlah pekerja guna menghemat pengeluaran operasional, sehingga angka pengangguran cenderung meningkat.

Tipe pengangguran ini sangat dipengaruhi oleh keadaan makroekonomi, khususnya perubahan dalam permintaan agregat. Ketika permintaan terhadap produk dan layanan menurun, produksi juga mengalami penurunan, sehingga perusahaan tidak membutuhkan sebanyak mungkin tenaga kerja. Ini mengakibatkan pengurangan karyawan atau berkurangnya peluang pekerjaan baru. Oleh sebab itu, pengangguran siklikal sering dianggap sebagai konsekuensi dari ketidakstabilan ekonomi secara keseluruhan dan biasanya diatasi melalui kebijakan fiskal dan moneter untuk merangsang pemulihan ekonomi (Todaro & Smith, 2015) (Lawalu dkk., 2025).

Pengangguran adalah salah satu elemen yang berkontribusi terhadap ketidakadilan

distribusi pendapatan (Martinez dkk., 2001). Menurut pandangan Sukirno (2010), kenaikan angka pengangguran dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya ketidakmerataan pendapatan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa orang-orang yang tidak bekerja tidak memiliki pendapatan, sehingga ketika jumlah pengangguran bertambah, distribusi pendapatan dalam masyarakat menjadi semakin tidak seimbang. Dengan pernyataan para ahli diatas sudah sangat jelas bahwa pengangguran merupakan salah satu faktor utama dalam menyumbangkan golongan masyarakat yang berada pada tingkat kemiskinan penyebab utama nya karana minim nya lapangan pekerjaan dan tidak ada nya pengahasilan untuk keperluan sehari-hari.

Inflasi

Inflasi dapat diartikan sebagai proses meningkatnya harga berbagai barang dan jasa secara menyeluruh dan berkelanjutan. Kenaikan harga yang hanya terjadi pada barang tertentu tidak termasuk inflasi selama tidak berdampak pada peningkatan harga komoditas lain secara umum. Tingkat inflasi dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu inflasi rendah yang berada di bawah 2% atau 3%, inflasi sedang yang berkisar antara 4% hingga 10%, serta inflasi berat yang dapat mencapai puluhan bahkan ratusan persen dalam satu tahun (Sadono Sukirno, 2004:14).

Menurut pandangan Keynes, inflasi terjadi karena masyarakat cenderung hidup melebihi kemampuan ekonominya. Kondisi tersebut menyebabkan permintaan terhadap barang dan jasa menjadi lebih besar dibandingkan jumlah barang yang tersedia di pasar, sehingga menimbulkan kesenjangan inflasi (*inflationary gap*). (Fitri Amalia, 2017) Sedangkan menurut pandangan World Bank, kenaikan harga kebutuhan pokok memberikan dampak yang lebih besar kepada kelompok masyarakat miskin karena sebagian besar pendapatan mereka digunakan untuk konsumsi sehari-hari. Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa semakin tinggi tingkat inflasi maka potensi meningkatnya kemiskinan di golongan masyarakat akan semakin tinggi pula jika tidak di tangani atau di imbangi dengan peningkatan pendapatan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis mengkaji pengaruh pengangguran dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2011–2025. Penelitian ini menggunakan metode campuran (*mixed method*), yaitu pendekatan penelitian yang memadukan metode kualitatif dan kuantitatif dalam satu kajian. Penggunaan kedua pendekatan tersebut bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam serta menghasilkan analisis yang lebih komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti.

Definisi Operasional Variabel

1.Kemiskinan adalah kondisi ketika penduduk tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang diukur berdasarkan garis kemiskinan menurut data Badan Pusat Statistik (BPS).

2.Tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Selatan merupakan ukuran yang menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk yang tidak memiliki pekerjaan dengan keseluruhan angkatan kerja. Perhitungan ini dilakukan setiap tahun dan disajikan dalam bentuk persentase.

3.Inflasi merupakan suatu keadaan dimana harga-harga baik barang maupun jasa meningkat secara umum dan terus menerus dalam periode tertentu. Variabel inflasi dalam penelitian ini di ukur berdasarkan persentase laju inflasi tahunan di Provinsi Sumatra Selatan.

Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan dua jenis data untuk menguji hipotesis yang telah diajukan, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data

kuantitatif berupa berbagai data berbentuk angka, sedangkan data kualitatif digunakan sebagai pendukung data kuantitatif dalam penyelesaian masalah melalui penjelasan deskriptif

2. Sumber data pada penelitian ini, peneliti memanfaatkan data sekunder sebagai sumber data penelitian, yaitu data yang sebelumnya sudah tersedia dan pernah digunakan dalam penelitian terdahulu. Data tersebut diperoleh melalui dokumen dari organisasi maupun lembaga lain yang memiliki hubungan serta relevansi dengan topik permasalahan yang diteliti.

Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Metode ini dilakukan dengan menelaah dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen, serta hasil penelitian sebelumnya. Menurut Milya Sari dan Asmendri (2020), penelitian kepustakaan merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan dengan menghimpun informasi dan data dari berbagai sumber pustaka, seperti buku referensi, laporan penelitian, jurnal ilmiah, artikel, serta dokumen lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti (Sari & Asmendri, 2020)

Metode Analisis

1. Metode Kualitatif Metode kualitatif dalam penelitian ini digunakan dengan memaparkan hasil analisis berdasarkan study literature serta berbagai temuan penelitian yang dikaitkan dengan teori-teori ilmiah yang relevan.
2. Pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini diterapkan untuk menganalisis pengaruh pengangguran dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan teknik analisis regresi linear berganda

Adapun formulasi dari analisis regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = \beta 0 + \beta 1X1 + \beta 2X2$$

Dimana :

X1 = Tingkat Pengangguran Provinsi Sumatera Selatan (%)
X2 = Tingkat Inflasi Provinsi Sumatra Selatan (%)
Y = Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatra Selatan (%)

β0 = intersep, konstanta yang merupakan rata – rata nilai Y apabila variabel lain dianggap konstan Untuk memudahkan proses perhitungan, uji hipotesis akan digunakan bantuan komputer dengan menggunakan fasilitas SPSS (Statistical Program Service Solution) versi 22.0

PEMBAHASAN HASIL

Pada periode 2011–2013, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Selatan cenderung mengalami penurunan. Persentasenya tercatat sebesar 6,60% pada tahun 2011, kemudian menurun menjadi 5,66% pada tahun 2012, dan kembali turun menjadi 4,84% pada tahun 2013. Namun pada tahun 2014 tingkat pengangguran kembali meningkat menjadi 4,96%. Selanjutnya pada tahun 2015 angka pengangguran meningkat cukup tinggi menjadi 6,07%. Selama periode 2016–2019, tingkat pengangguran menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2016 persentasenya menurun menjadi 4,31%, lalu meningkat sedikit menjadi 4,39% pada tahun 2017. Pada tahun 2018 angka tersebut kembali turun menjadi 4,27%, namun pada tahun 2019 meningkat lagi hingga mencapai 4,53%.

Pada tahun 2020 tingkat pengangguran mengalami peningkatan yang cukup besar hingga mencapai 5,51% akibat pandemi Covid-

19 yang berdampak pada melemahnya aktivitas ekonomi dan berkurangnya kesempatan kerja bagi masyarakat. Setelah pandemi mulai terkendali, tingkat pengangguran kembali menurun secara bertahap, yaitu menjadi 4,98% Periode 2022–2025 menunjukkan adanya penurunan tingkat pengangguran secara bertahap. Dari 4,63% pada tahun 2022, angka tersebut menurun menjadi 4,11% pada tahun 2023, kemudian menjadi 3,86% pada tahun 2024, dan kembali berkurang hingga mencapai 3,69% pada tahun 2025. Penurunan tersebut menunjukkan mulai membaiknya kondisi perekonomian daerah, meningkatnya investasi, serta bertambahnya peluang kerja di berbagai sektor usaha di Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan data periode 2011–2025, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan pola fluktuatif. Pada awal periode penelitian, tingkat pengangguran masih berada pada kategori yang relatif tinggi, tetapi kemudian mengalami penurunan secara bertahap hingga periode sebelum pandemi Covid-19. Namun pada masa pandemi tingkat pengangguran kembali meningkat akibat perlambatan ekonomi dan terbatasnya aktivitas usaha. Membaiknya kondisi perekonomian pascaperiode perlambatan ekonomi mendorong penurunan tingkat pengangguran. Berikut ini dijelaskan tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini: Tabel 1. Tingkat Pegangguran Terbuka, Di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2011-2025 (%)

Pengangguran		
Tahun	Semester 1	Semester 2
2011	6,16	6,60
2012	5,60	5,66
2013	5,41	4,84
2014	3,84	4,96
2015	5,03	6,07
2016	3,94	4,31
2017	3,80	4,39
2018	4,08	4,27
2019	4,02	4,53
2020	3,90	5,51
2021	5,17	4,98
2022	4,74	4,63
2023	4,53	4,11
2024	3,97	3,86
2025	3,89	3,69

Sumber: BPS Sumatra Selatan

Selain pengangguran, inflasi juga merupakan salah satu faktor yang berperan dalam memengaruhi tingkat kemiskinan masyarakat. Apabila harga kebutuhan pokok terus meningkat tanpa diimbangi oleh kenaikan pendapatan yang memadai, maka kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari akan semakin menurun. Keadaan ini pada akhirnya dapat menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk yang hidup dalam kondisi kemiskinan.

Berdasarkan data periode 2011–2025, tingkat inflasi di Provinsi Sumatera Selatan memperlihatkan pergerakan yang tidak stabil. Inflasi pada tahun 2011 sebesar 5,10% dan menurun menjadi 2,60% pada tahun 2012. Pada tahun 2013 terjadi peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 7,21%, yang dipengaruhi oleh kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok serta bahan bakar minyak. Meskipun inflasi kembali menurun menjadi 3,35% pada tahun 2014, angkanya kembali meningkat menjadi 6,99% pada tahun 2015. Pada periode berikutnya, inflasi berada pada level 4,38% pada tahun 2016, lalu turun menjadi 3,00% pada tahun 2017 dan tercatat sebesar 3,35% pada tahun 2018.

Pada tahun 2019 inflasi kembali menurun menjadi 2,74%, bahkan pada tahun 2020 turun cukup drastis menjadi 1,01% akibat menurunnya aktivitas ekonomi selama

pandemi Covid-19. Selanjutnya pada tahun 2021 inflasi meningkat menjadi 1,84%, kemudian mengalami kenaikan cukup tinggi pada tahun 2022 hingga mencapai 6,71% akibat meningkatnya harga bahan pangan dan energi. Pada tahun 2023 inflasi tercatat sebesar 4,92%, kemudian turun menjadi 1,40% pada tahun 2024. Namun pada tahun 2025 inflasi kembali meningkat menjadi 3,44%. Fluktuasi inflasi tersebut menunjukkan adanya perubahan kondisi ekonomi yang dipengaruhi oleh harga kebutuhan pokok, bahan bakar minyak, dan kondisi perekonomian nasional maupun daerah. Hal ini di buktikan dengan data dari inflasi di Sumatra Selatan yang ada di tabel berikut:

Tabel 2. Tingkat Inflasi PerTriwulan I dan III, Di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2011-2025 (%)

Inflasi		
Tahun	Triwulan 1	Triwulan 3
2011	5,13	5,10
2012	3,82	2,60
2013	5,23	7,21
2014	5,11	3,35
2015	6,26	6,99
2016	5,05	4,38
2017	3,71	3,00
2018	3,35	3,35
2019	1,66	2,74
2020	3,15	1,01
2021	1,12	1,84
2022	2,96	6,71
2023	2,86	4,92
2024	3,24	1,40
2025	1,77	3,44

***Sumber* : Bank Indonesia Sumatra Selatan**

Berdasarkan data periode 2011–2025, tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan dinamika yang berbeda setiap tahunnya. Persentase penduduk miskin tercatat sebesar 14,24% pada tahun 2011 dan mengalami penurunan menjadi 13,48% pada tahun 2012. Pada tahun 2013 tingkat kemiskinan kembali meningkat menjadi 14,06%, namun pada tahun 2014 menurun menjadi 13,62%. Setelah mengalami perubahan pada tahun-tahun sebelumnya, persentase kemiskinan pada tahun 2015 kembali naik menjadi 13,77%.

Pada tahun 2016, tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan tercatat sebesar 13,39%. Angka tersebut kemudian menunjukkan tren penurunan secara bertahap menjadi 13,10% pada tahun 2017, 12,82% pada tahun 2018, dan 12,56% pada tahun 2019. Akan tetapi, pada tahun 2020 tingkat kemiskinan kembali meningkat hingga mencapai 12,98%. Kenaikan ini dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19 yang menghambat aktivitas perekonomian dan menyebabkan bertambahnya jumlah pengangguran.

Seiring dengan proses pemulihan ekonomi, tingkat kemiskinan kembali mengalami penurunan. Persentasenya tercatat sebesar 12,79% pada tahun 2021, kemudian turun menjadi 11,95% pada tahun 2022, 11,78% pada tahun 2023, 10,51% pada tahun 2024, dan mencapai 9,85% pada tahun 2025. Tren penurunan tersebut mengindikasikan adanya perbaikan kesejahteraan masyarakat yang didukung oleh meningkatnya peluang kerja, membaiknya kondisi ekonomi daerah, serta bertambahnya pendapatan masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 3. Tingkat Kemiskinan, Di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2011-2025 (%)

Kemiskinan		
Tahun	Semester 1	Semester 2

2011	14,24	14,24
2012	13,78	13,48
2013	14,24	14,06
2014	13,91	13,62
2015	14,25	13,77
2016	13,54	13,39
2017	13,19	13,10
2018	12,80	12,82
2019	12,71	12,56
2020	12,66	12,98
2021	12,84	12,79
2022	11,90	11,95
2023	11,78	11,78
2024	10,97	19,51
2025	10,15	9,85

*Sumber:***BPS Sumatra Selatan**

Berdasarkan hasil estimasi yang diperoleh melalui pengolahan data menggunakan SPSS, sebagaimana terlihat pada tabel *Coefficients*, diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

Y=8.186+0.788X1+0.245X2

Persamaan regresi yang diperoleh mencerminkan hubungan antara variabel pengangguran (X1) dan inflasi (X2) terhadap tingkat kemiskinan masyarakat (Y). Untuk memahami makna dari setiap parameter dalam model tersebut, penjelasannya disajikan sebagai berikut:

1. Coefficients (Koefisien Regresi)

Nilai konstanta (a) sebesar 8,186 mengindikasikan bahwa tingkat kemiskinan masyarakat diperkirakan berada pada angka 8,186 ketika variabel pengangguran (X1) dan inflasi (X2) diasumsikan tidak mengalami perubahan atau bernilai nol. Sementara itu, koefisien regresi untuk variabel pengangguran (X1) sebesar 0,788 menunjukkan bahwa setiap peningkatan pengangguran sebesar satu satuan akan diikuti oleh kenaikan tingkat kemiskinan sebesar 0,788 satuan, dengan asumsi variabel lainnya tetap atau konstan. Nilai koefisien yang positif menandakan adanya hubungan searah antara pengangguran dan kemiskinan, sehingga peningkatan tingkat pengangguran cenderung diikuti oleh meningkatnya tingkat kemiskinan masyarakat. Koefisien regresi variabel inflasi (X2) sebesar 0.245 berarti setiap kenaikan inflasi sebesar 1 satuan akan meningkatkan tingkat kemiskinan sebesar 0.245 satuan, dengan asumsi variabel lain konstan.

2. Uji t (Parsial)

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel pengangguran (X1) memiliki nilai t hitung sebesar 3,549 dan nilai signifikansi sebesar 0,001. Dengan tingkat signifikansi yang berada di bawah 0,05, dapat disimpulkan bahwa variabel pengangguran berpengaruh secara nyata terhadap tingkat kemiskinan masyarakat. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel inflasi (X2) memiliki nilai t hitung sebesar 2,392 dengan nilai signifikansi sebesar 0,024. Dengan demikian, karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, inflasi terbukti berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan masyarakat.

3.Uji F (Simultan)

Hasil analisis ANOVA menunjukkan F hitung sebesar 12,088 dengan nilai signifikansi 0,000. Dengan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05, dapat dinyatakan bahwa variabel pengangguran dan inflasi secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan.

4. Koefisien Determinasi (R Square)

Hasil output *Model Summary* menunjukkan nilai R Square sebesar 0,472, yang berarti bahwa variabel pengangguran dan inflasi mampu menjelaskan variasi tingkat kemiskinan sebesar 47,2%. Adapun sebesar 52,8% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

5. Standardized Coefficients (Beta)

Nilai Beta variabel pengangguran (X1) yang sebesar 0,513 menunjukkan bahwa pengangguran memiliki hubungan positif dengan tingkat kemiskinan dan memberikan pengaruh yang relatif kuat dalam model penelitian ini. Nilai Beta variabel inflasi (X2) sebesar 0.346 menunjukkan bahwa inflasi juga memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan, namun pengaruhnya lebih kecil dibandingkan variabel pengangguran.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengangguran dan inflasi memiliki hubungan positif dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan pada periode 2011–2025. Hasil analisis regresi linear berganda mengindikasikan bahwa peningkatan pengangguran dan inflasi cenderung diikuti oleh meningkatnya tingkat kemiskinan. Temuan ini menunjukkan bahwa kondisi pasar tenaga kerja dan perkembangan harga barang serta jasa merupakan aspek yang berperan penting dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel pengangguran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi jumlah penduduk yang tidak bekerja, maka semakin besar potensi meningkatnya angka kemiskinan, karena berkurangnya sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Selain itu, variabel inflasi juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai signifikansi sebesar 0,024. Kondisi ini menunjukkan bahwa kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus dapat menurunkan daya beli masyarakat, terutama pada kelompok berpendapatan rendah yang lebih rentan terhadap perubahan tingkat harga.

Berdasarkan hasil uji simultan, pengangguran dan inflasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan dengan nilai signifikansi uji F sebesar 0,000. Sementara itu, nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,472 menunjukkan bahwa 47,2% variasi tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel pengangguran dan inflasi. Adapun sisanya, yaitu sebesar 52,8%, dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangguran merupakan variabel yang memiliki pengaruh lebih besar dibandingkan inflasi terhadap tingkat kemiskinan.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan diharapkan dapat meningkatkan berbagai program yang mendukung penciptaan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan investasi, memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja. Selain itu, langkah-langkah untuk menjaga

stabilitas harga dan mengendalikan inflasi, khususnya pada komoditas kebutuhan pokok, perlu terus dilakukan guna mempertahankan daya beli masyarakat dan mengurangi risiko bertambahnya jumlah penduduk miskin.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar cakupan kajian diperluas dengan menambahkan variabel-variabel lain yang diduga turut memengaruhi tingkat kemiskinan, seperti pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat pendidikan, upah minimum, serta ketimpangan pendapatan.

DAFTAR PUSTAKA

Adawiyah, S. E. (2020). Kemiskinan dan faktor-faktor penyebabnya. Journal of Social Work and Social, 1(April), 43–50.

Amalia, F. (2012). Pengaruh pendidikan, pengangguran dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) periode 2001–2010. Jurnal Ilmiah Econosains, 10(2), 158–169.

Hildegunda, W. (2010). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin di wilayah pemekaran tingkat kabupaten (Studi kasus perbandingan jumlah penduduk miskin sebelum dan sesudah pemekaran di Kabupaten Nagekeo Provinsi NTT tahun 2005–2009). Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699.

Imanto, R., Panorama, M., & Sumantri, R. (2020). Pengaruh pengangguran dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan. Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, 11(2), 118–139.

Lawalu, E. M., Tanau, M. K., Emilrensi, A. N., Bolla, L. V., & Kabba, M. N. (2025). Ketimpangan job fair dan ketidakpedulian struktural pemerintah terhadap pengangguran di Indonesia. Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business, 8(3), 816–827.

Mardiatillah, R., Panorama, M., & Maftukhatusolikha, M. (2021). Pengaruh pengangguran dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan tahun 2015–2019. Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains, 10(2), 365–370.

Martinez, R., Anyala, L., & Huerta, J. R. (2001). The impact of unemployment on inequality and poverty in OECD countries. Economics of Transition, 9(2), 417–447.

Muthia, Z., Yazid, A., & Ahmad, W. (2026). Analisis konseptual pengangguran dan inflasi dalam teori ekonomi makro. Maximal Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial dan Ekonomi, 3(3), 21–27.

Papilaya, J. (2020). Kebijakan publik dalam pengentasan kemiskinan. Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan, 4(1).

Permana, H., & Pasaribu, E. (2023). Pengaruh inflasi, IPM, UMP dan PDRB terhadap kemiskinan di Pulau Sumatera. Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi (MEA), 7(3), 1113–1132.

Probosiwi, R. (2018). Pengangguran dan pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan. E-Journal Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Retnowati, D., et al. (2017). Pengaruh pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. JP FEB Unsoed.

Sari, M., & Asmendri. (2020). Penelitian kepustakaan (library research) dalam

penelitian pendidikan IPA. Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA, 6(1), 41–53.

Sukirno, S. (2004). Makroekonomi: Teori pengantar. RajaGrafindo Persada.

Sukirno, S. (2006). Ekonomi pembangunan: Proses, masalah, dan dasar kebijakan. Kencana.

Supraba, S. Y. (2018). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007-2015.